

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Polisi**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Pengertian kepolisian telah tercantum didalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai satu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan , maka apabila berbicara tentang kepolisian berarti juga berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian.

Kepolisian di atur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 30 ayat (4) berbunyi “ *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”.

Dari kata “ polisi” tersebut para cendekiawan Kepolisian menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian polisi, yaitu :

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebaga organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai jabatan atau petugas <sup>5</sup>

Menurut Sadjijono istilah ”polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, istilah kepolisisan adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni sebagai lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia tersebut agar dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

<sup>5</sup> Kunarto, 1997, *Etika Kepolisisan*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.56.

<sup>6</sup> Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.6.

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesai, sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Seluruh wilayah negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian tingkat Provinsi disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, di tingkat kecamatan disebut Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan ditingkat Desa atau Kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Polisi

Fungsi Polisi terdapat di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab I ketentuan umum pasal 2 berbunyi “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat*”.

Seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi mempunyai 2 pengemban fungsi kepolisian, yaitu :

- a. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

---

<sup>7</sup> Pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri, diakses tanggal 16 april 2018

- 1) kepolisian khusus;
  - 2) penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - 3) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- b. Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan fungsinya yaitu : <sup>8</sup>

- a. Asas Legalitas, Polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum harus wajib tunduk terhadap hukum yang berlaku.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukumnya.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.
- e. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada tindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup> Bisriliham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32.

Kepolisian dalam hal ini memiliki tiga fungsi utama yaitu : <sup>9</sup>

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usah ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang ada pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi :
  - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang.
  - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

---

<sup>9</sup> Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*, Wirasepin Polri, Bandung, hlm.225-226.

Tugas penyelidikan dan Penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (pejabat polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”) meliputi kegiatan :

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
- c. Mencari serta mengumpulkan bukti
- d. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- e. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana <sup>10</sup>

### **3. Tugas dan wewenang Polisi**

#### **a. Tugas Polisi**

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas-tugas pokok yang memuat tiga substansi diatas. Rumusan ketiga tugas pokok tersebut

---

<sup>10</sup> H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama. Surabaya, hlm.36-37.

menggambarkan urutan prioritas atau hirarki, namun ketiganya sama-sama penting.<sup>11</sup>

Mengenai tugas yang dilaksanakan oleh kepolisian, dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 69.

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

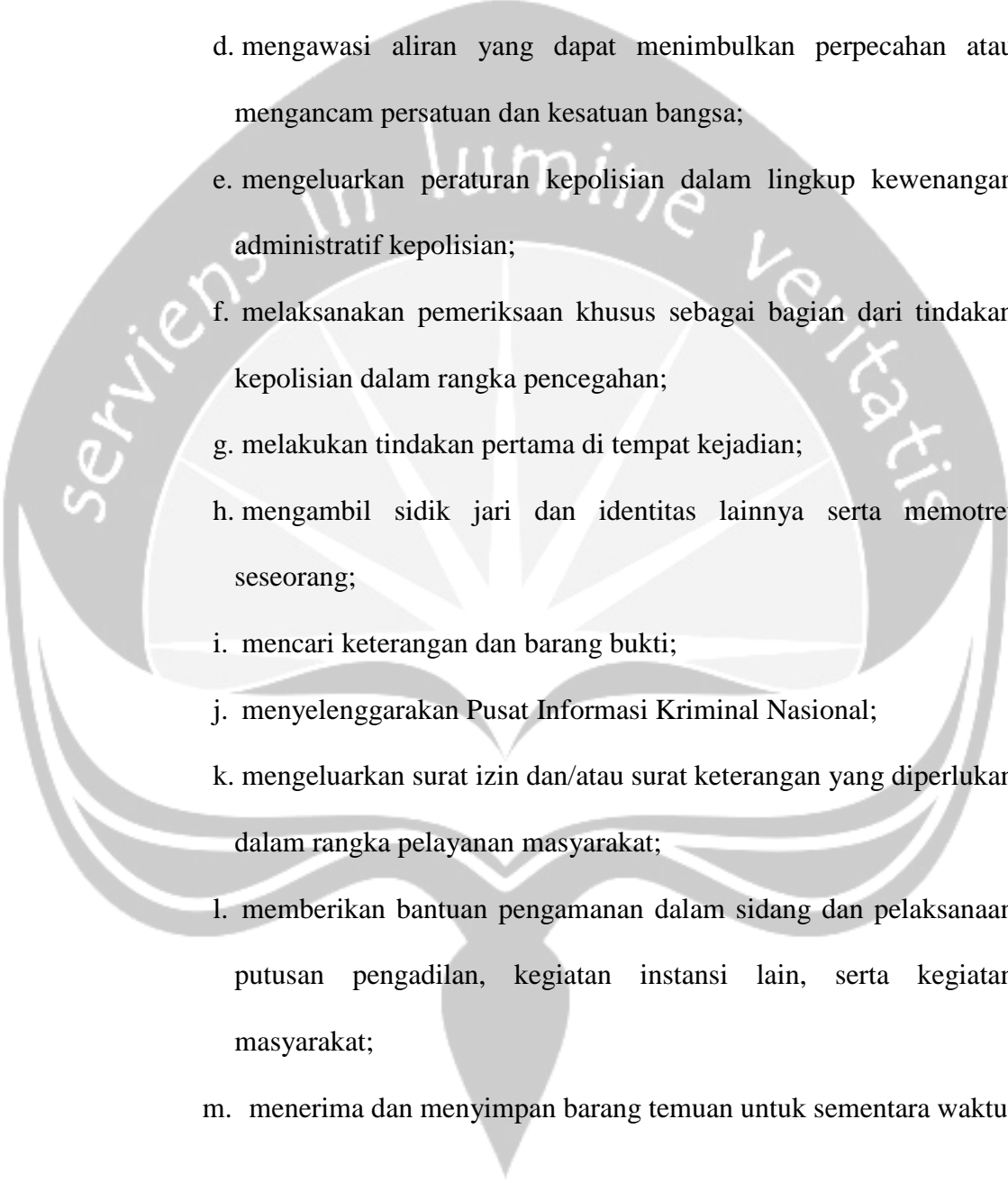
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### b. Wewenang Polisi

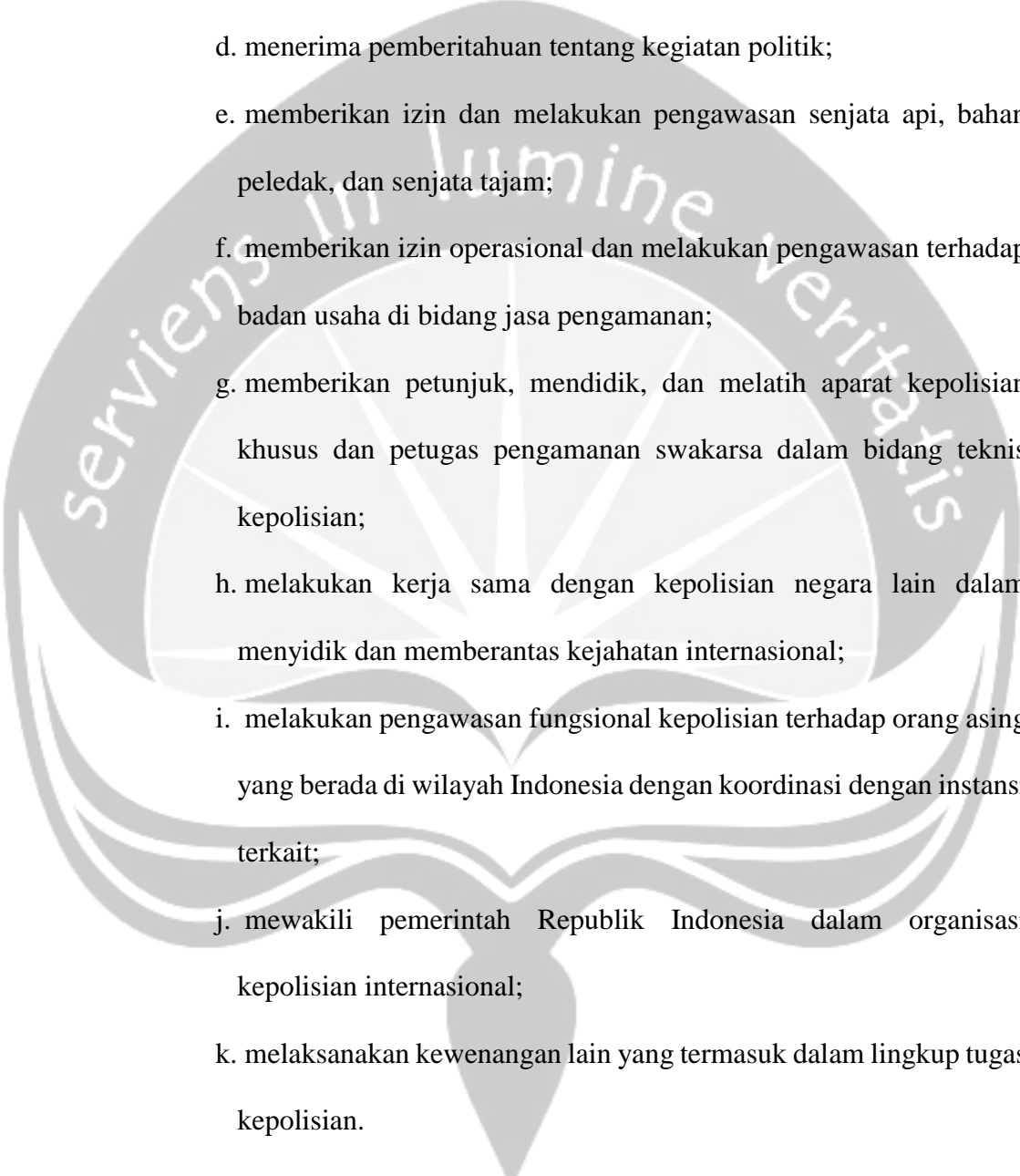
Berkaitan dengan pelaksanaan tugas polri, seperti yang telah disebutkan diatas, maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:



- 
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

”Perbuatan pidana”, “pristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP.

Tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil sehingga sesuatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana <sup>12</sup>

Salah satu asas hukum pidana, yakni asas legalitas yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak

---

<sup>12</sup> M.Sudrajat Bassir, 1986, *Tindak-tindak pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, hlm.2.

pidana dengan undang-undang (hukum pidana), sehingga terlebih dahulu pembentukan undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimana yang akan dikenakan.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan hambatan akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>13</sup>

Maksud adanya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan Bahasa dari istilah asing *strabaar feit*, namun belum jelas apakah disamping mengalihkan Bahasa dari istilah *strabaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* *feit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum, yang sudah barang tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>14</sup>

Tentang tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Moeljatno menganut pandangan

<sup>13</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana* edisi cetakan ke-8, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100.

<sup>14</sup> P.A.F.Laminatang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm, 81.

dualistis yaitu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana. Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidana orangnya dan memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana

Sedangkan pandangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Jadi untuk adanya suatu perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur : <sup>15</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Melawan hukum

Salah satu unsur dari Tindak Pidana yang penting adalah unsur sifat melawan hukum. Dalam kepustakaan hukum pidana sifat melawan hukum ini ada 2 (dua) sifat yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formil itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan ini dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Op Cit.*, hlm 125.

## 2. Pengertian Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dipahami berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP yang berbunyi: *“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP buku II Bab XXII, Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP yang dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

### a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa termuat dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: *“Barang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Barang yang diambil
- 3) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

#### b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menentukan bahwa pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, dimana cara atau keadaan tertentu antara lain adalah:


- 1) Pencurian hewan ternak.
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana alam, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan api, huru hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan atau memanjat atau memakai atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu.

#### c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan menurut KUHP tentang pencurian Pasal 364 yang dinyatakan sebagai berikut : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Bedasarkan Pasal 364 KUHP diatas, maka Unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

- 
- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)
  - 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 364 ayat (1) ke-4 KUHP)
  - 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
  - 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
  - 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan
  - 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang di antaranya menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai



barang yang dicurinya. Sementara itu dari Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) adalah hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana diperberat, antara lain:

Ayat 2 berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun :

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat

Ayat 3 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.

Ayat 4 berbunyi diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

### **3. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan**

Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa orang seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah sebuah aktivitas

yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek didalam struktur subjek. Subjek ini memiliki banyak pengertian. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.<sup>16</sup>. Kekerasan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikaitkan dengan ancaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik.<sup>17</sup>.

Secara Yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja dalam Bab IX pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa : ” Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.<sup>18</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan-kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan kekerasan, antara lain adalah<sup>19</sup>:

- a. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- b. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP

<sup>16</sup> Lucien van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta, hlm 47.

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.58.

<sup>18</sup> Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.

<sup>19</sup> Mulyana W. Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm.123-124.

- c. Kejahatan penganiayaan, pasal 351- pasal 358 KUHP terutama penganiayaan berat ( *zware mishandeling*) pasal 354 dan 355 KUHP.
- d. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, pasal 359 – pasal 361 KUHP
- e. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.

Macam-macam kekerasan :

- a. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan :

- 1) Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Contoh : Penganiayaan, pemukulan, pembunuhan

- 2) Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

- 3) Kekerasan Struktural, yaitu kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur kekerasan structural karena hanya negara yang memiliki kewenangan

resmi untuk mendorong pembentukan atau perubahan structural dalam masyarakat.

Contoh : Terjangkitnya penyakit kulit suatu daerah akibat limbah pabrik disekitarnya atau hilangnya rumah warga Sidoarjo karena lumpur panas.

b. Berdasarkan Pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu :

1) Kekerasan *Individual* adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada suatu atau lebih individu.

Contoh : Pencurian, Pemukulan, Penganiayaan, dan lain-lain

2) Kekerasan *Kolektif* adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa

Contoh : Tawuran pelajar, Bentrok antar desa, Konflik di Sampit, Poso, dan lain-lain.

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 (1) KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam Pasal 365 KUHP bahwa :

a. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada

kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

b. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.

- 1) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3) Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau matidilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah :

- a. Pencurian, yang:
  - b. Didahului atau disertai atau diikuti
  - c. Kekerasan atau ancaman kekerasan
  - d. Terhadap orang
  - e. Dilakukan dengan maksud untuk :
    - 1) Mempersiapkan, atau
    - 2) Memudahkan, atau
    - 3) Dalam hal tertangkap tangan.
    - 4) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain
    - 5) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP, adalah :

- a. Waktu malam
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

- c. Di jalan umum.
- d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

### **C. Peran dan Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

#### **1. Perkembangan Pencurian dengan Kekerasan di Polres Sleman Sleman**

Hasil Penelitian Kasus Curas, masuk dalam data kejahatan Curas.

Jumlah Kejahatan Curas yang diperoleh dari Polres Sleman yaitu :

**TABEL 1**

**Data Jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Sleman dalam kurun waktu Tahun 2015-2017**

NO	TAHUN	LAPORAN	SELESAI	TUNGGAKAN
1	2015	52	24	28
2	2016	54	28	26
3	2017	35	20	15

*Sumber : Polres Sleman*

Bedasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber dari penyidik Pembantu Unit 1 Pidana Umum Sat Reskrim Polres Sleman yakni Bripka Suprihatin, tindak pidana pencurian memang suatu hal yang sering terjadi di Kabupaten Sleman. Untuk Kasus Pencurian dengan kekerasan sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya memang sering terjadi dan mengapa penulis hanya mengambil dari tahun 2015 -2017 itu karenapenulis ingin melihat perkembangan penanganan kasus pencurian

dengan kekerasan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Setiap tahunnya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan naik turun dan jumlah untuk kasus yang tidak terselesaikan (Tunggakan) setiap tahun semakin menurun. Untuk kasus yang sudah diselesaikan menurut data diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan untuk kasus yang sudah diselesaikan

Di Polres Sleman, wilayah yang rawan akan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat di kecamatan Depok, Kalasan, dan Melati. Dalam menjalankan aksinya para pencuri ini pada umumnya tidak hanya bekerja sendiri melainkan berkelompok, geng Klitih yang dimana geng ini beranggotakan 10 orang dalam menjalankan aksinya. Biasanya para pelaku ini berusia diatas 25 Tahun dan ada juga di bawah umur yaitu 18 tahun kebawah, yang dimana biasanya untuk umur 18 tahun kebawah mereka biasanya dalam menjalankan aksinya selalu berkelompok jarang sekali sendirian. Kebanyakan kasus yang terjadi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menjalankan aksinya selalu di tengah malam dan di jalan-jalan umum yang sepi tidak terlalu banyak orang yang lalu lalang.

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Suprihatin terdapat beberapa faktor yang membuat para pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu :

- a. Ekonomi, yaitu para pelaku ini tidak ada pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya dan juga gaji yang tidak cukup.



b. *Risidive*, yaitu Pengulangan kejahatan karena sudah menjadi kebiasaan sehingga setelah menjalani pidana untuk kejahatan terdahulu, pelaku mengulangnya lagi.

c. Adanya niat dan kesempatan, biasanya para pelaku ini menjalankan aksinya karena ada nya suatu niat. Bahkan yang awal nya tidak punya niat untuk mencuri tetapi karena ada kesempatan maka terjadilah pencurian tersebut.

Para pelaku dalam menjalankan aksi tindak pidana tersebut sangat lah kerorganisir, hal ini dikarenakan adanya suatu pembagian tugas yang baik diantara para anggotanya. Pembagian tugas kepada para pelaku itu seperti ada yang mensurvei lokasi dengan kriteria tempat tersebut sepi pada malam hari dan letaknya jauh dari rumah warga dan kantor polisi, ada juga yang anggotanya sudah siap-siap untuk melakukan kekerasan terhadap korban apabila melakukan perlawanan.

Dalam menjalankan aksinya para pelaku membekali dirinya dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya. Biasanya senjata yang digunakan berupa pisau, parang, golok, dan samurai dan juga menggunakan benda tumpul seperti balok kayu. Kekerasan yang dilakukan itu seperti Tarik menarik, pemukulan, bahkan sampai melakukan pembacokan. Tujuan dibawahnya senjata tajam tersebut untuk mempermudah pencurian dengan didahului, disertai, dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban.

Terhadap hasil kejahatan yang diambil oleh para pelaku dari korbannya ini ada yang langsung dijual kepada penadah supaya barang bukti bisa langsung hilang dan langsung bisa mendapatkan uang dan ada

juga yang digunakan pribadi oleh si pelaku tersebut. Untuk yang dijual kepada para penada ada yang dijual secara utuh dan terpisah-pisah. Biasanya untuk barang yang dijual kepada penada yang berada di Magelang, Semarang, dan Solo.

## **2. Peran Polres Sleman dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak Pidana Curas di wilayah Kabupaten Sleman selalu menunjukkan presentase angka yang cukup tinggi di antara semua kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan jumlah kasus setiap bulan membuat kebanyakan masyarakat terganggu, bahkan para pelaku sekarang tidak pilih pilih dalam mencari korbannya, apakah itu perempuan, ibu-ibu, bahkan orang dewasa mereka tidak pandang bulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Suprihatin, peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berupa upaya Preventif dan Represif. Upaya Preventif dan Represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penanggulanagn kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan curas mengedepankan partisipasi dan kerjasama antara polisi dengan semua lapisan masyarakat.

Dalam hal menanggulangi Curas secara Preventif dan Represif pihak kepolisian berdasarkan wawancara dengan Bripta Suprihatin bahwa saat ini di Polres Sleman terdapat upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam mengatasi curas, yaitu :

- a. Upaya Preventif dalam Tindak Pidana Curas

Upaya Preventif yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang ada pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Bedasarkan wawancara dengan Bripka Suprihatin ada beberapa cara penanggulangan secara preventif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu:

1) Melakukan Sosialisasi

Dalam melakukan Sosialisasi ini sub bagian Direktorat Pembina, Ketertiban dan Penyuluhan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat untuk mengikuti penyuluhan di setiap kecamatan. Adapun tujuan dari dilakukan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai curas yang sering terjadi dan bagaimana cara menjaga diri dan apa yang harus dilakukan jika terjadi curas.

2) Melakukan penyuluhan Hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat ini yang membuat seringnya terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dalam masyarakat, sehingga penting untuk dapat menyadarkan bahwa mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### 3) Melakukan Patroli

Hal yang dilakukan oleh Polres Sleman yaitu menyelenggarakan patrol antar wilayah. Untuk mencegah terjadinya Curas yang dilakukan oleh kelompok, pelajar atau pun Geng, maka satuan unit Bima dan Sabhara Polres Sleman melakukan Patroli ketempat-tempat yang diduga tempat yang sering terjadi pencurian atau tempat yang sering dijadikan markas untuk para pelaku menyimpan barang ataupun melancarkan aksinya dan menjaga keamanan disetiap daerah Kabupaten Sleman.

### 4) Mengadakan pengawasan kepada residivis

Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan residivis mengulangi perbuatannya setelah menjalankan pidananya karena menganggap hanya itu keahliannya yang dapat menghasilkan uang baginya.

#### b. Upaya Repreif dalam Tindak Pidana Curas

Upaya Represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku dalam hal ini pelaku tindak pidana curas, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2015-2017 berdasarkan table diatas, Polres Sleman pada tahun 2015 menerima laporan sebanyak 52 kasus, 24 kasus selesai dan terdapat 28 kasus yang belum terselesaikan. Pada tahun 2016 menerima laporan sebanyak 54 kasus, 28 kasus selesai dan terdapat 26 kasus yang belum terselesaikan dan di tahun 2017 menerima 35 kasus, 20 kasus selesai dan 15 kasus tidak terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan curas yang berhasil ditangani dan di selesaikan oleh Polres Sleman. Meskipun masih minim jika dibandingkan dengan laporan yang masuk.

Adapaun beberapa langkah yang dilakukan oleh Polres Sleman yaitu:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

### **3. Kendala yang dihadapi Polres Sleman dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Bripka Suprihatin, dapat diketahui kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dihadapi oleh polisi di Polres Sleman sebagai berikut :

- a. Minimnya saksi, dalam hal ini para pelaku dalam menjalankan aksinya sangatlah terorganisir adapun karna korbannya sendirian tidak ada teman

nya ataupun orang lain disekitar sana sehingga dalam menjalankan aksinya tidak ada yang melihat, hal itu yang membuat pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut terhambat karena tidak ada saksi yang melihat atau yang ada di tempat kejadian.

- b. Para Korban Trauma sehingga sampai tidak bisa mengenali para pelaku kejahatan ataupun para pelaku menutupi mukanya dengan kain sehingga tidak kelihatan mukanya. Korban yang trauma ini biasanya sering dialami oleh para wanita yang dimana baru pertama mengalami kekerasan dan ketakutan akan kejadian tersebut.
- c. Tindakan atau perilaku masyarakat yang menganggap enteng tentang keselamatan barang milik nya dan kurang mendukung pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan benda yang dimiliki. Dalam hal ini masyarakat masih terlalu dini untuk mengatasi hal tersebut, mereka cenderung akan berhati-hati ketika kejadian tersebut terjadi terhadap dirinya dari pada melakukan pencegahan sejak awal sebelum mengalami kejadian tersebut.
- d. Kurangnya Personil yaitu Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Hal ini tentu saja tidak cukup sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Sleman dalam merespon laporan ataupun temuan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Kurangnya sistem keamanan yang dimiliki oleh setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian, rumah, kos-kosan dan tempat ibadah

sehingga membuat aparat polisi susah untuk mengidentifikasi ciri-ciri para pelaku tindak pidana pencurian ini.

- f. Biaya operasional juga merupakan salah satu kendala yang membuat Kepolisian terhambat dalam memburu pelaku kejahatan pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti kekerasan. Biaya operasional yang tidak memadai tentu saja akan menghambat upaya penanganan kasus hingga pada saat proses BAP yang memakan biaya yang tidak sedikit.

Kendala diatas akan bermuara kembali kepada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat karena dalam hal ini dalam membina masyarakat untuk menjagah ataupun melindungi barang kepunyaannya dari bahaya pencurian yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Polisi, masyarakat, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan memiliki kaitan yang erat satu sama lain dalam mengatasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Semua itu haruslah berjalan beriringan untuk melakukan upaya Preventif dalam mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kabupaten Sleman.